

## Mendiknas Resmikan Pembangunan RSP UMM

MALANG — Usai membuka Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (Pimnas) XXII, dan Workshop Pendidikan Khusus/Pendidikan Layanan Khusus, Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas), Bambang Sudibyo meresmikan peletakan batu pertama pembangunan Rumah Sakit Pendidikan (RSP) Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), kemarin (22/7). Pembangunan RSP bernilai Rp 108,7 miliar dengan enam lantai itu diharapkan bisa mendorong UMM menjadi universitas *world class*.

"Pembangunan RS UMM ini kita harapkan bisa memberikan manfaat tidak hanya untuk dunia pendidikan. Namun, juga bisa memberikan pelayanan sosial pada masyarakat, baik lokal, maupun nasional. Terutama yang berkaitan dengan keutuhan NKRI," jelas dia.

Selain itu, kata dia, yang lebih penting lagi adalah mendorong UMM menjadi universitas *word class* tanpa melupakan dampak ekonominya. Sebab, fondasi jihad Muhammadiyah itu terletak pada pendidikan, sosial dan ekonomi.

Kendati demikian, dia mengingatkan bahwa RS Pendidikan UMM secara prinsip sama dengan perguruan tinggi lainnya. Prinsip yang dimaksud Bambang Sudibyo tidak lain terkait dengan otonomi kampus. Alasannya, pemerintah hanya menyiapkan rambu-rambu dan standar yang mengacu pada regulasi.

Di antara regulasi yang dimaksudkan adalah Undang-undang Sisdiknas, UU Badan Huum Pendidikan (BHP) dan lain sebagainya. Makanya, Mendiknas tidak terlalu khawatir bakal terjadi komersialisasi pendidikan.

"Komersialisasi pendidikan saya tidak melihat. Misalnya, seperti UMM ini. Sebab, dengan memiliki RS, pungutan yang dilakukan tidak dipakai untuk memperkaya diri sendiri maupun kelompok tertentu. Namun, dimanfaatkan untuk pengembangan pembangunan atau institusi. Itu kan bukan korupsi," tegasnya.

Apalagi, pemerintah sudah menetapkan bahwa pendidikan bagi warga miskin di perguruan tinggi pemerintah menyediakan minimal 20 persen. Sedangkan jumlah warga miskin di Indonesia hanya 16 persen. Sementara yang kuliah di perguruan tinggi jumlah orang miskin itu hanya 3 persen.

Untuk itu, dia berharap agar RS UMM yang dibangun dengan dana miliaran rupiah tersebut bisa mendorong UMM menjadi universitas *word class*. "Meski begitu, fakultas ekonomi dan yang lainnya tidak sampai dilupakan pengembangannya," harap dia.

Menyikapi harapan tersebut, Rektor UMM, Muhadjir Effendy berjanji tidak hanya fokus pada pendidikan kedokteran semata. Namun, juga riset dan pengembangan keilmuan kesehatan. Selain itu pembangunan RS UMM ini diproyeksikan bukan untuk rumah sakit biasa, "Tapi sebagai Rumah Sehat. Jadi orang yang masuk nanti cepat sehat," katanya.

Dia menjelaskan bahwa RS UMM ini akan dibangun di atas lahan seluas 9 hektare. Dana yang dianggarkan sekitar Rp 108,7 miliar. Sedangkan pembangunan fisiknya saja sekitar Rp 58,7 miliar. "Fasilitasnya nanti dilengkapi dengan lapangan sepak bola dan hellipad," jelasnya.

Selain itu, RS UMM berlantai enam ini akan menjalin kerja sama dengan kedokteran perguruan tinggi mancanegara. Di antaranya, China, Belanda dan Malaysia. "Khusus untuk penyakit-penyakit tropis kita bekerja sama dengan China," tegasnya.

Sedangkan bidang layanannya tidak hanya melayani orang-orang sakit biasa. Namun, juga melayani lansia, rehabilitasi korban narkoba dan anak-anak yang membutuhkan pelayanan khusus. Makanya, fasilitas penunjang dilengkapi dengan masjid, toserba, *guest house*, *play ground*, dan *sport area*.

Karena itu, kata Muhadjir, RS UMM ini bisa dijadikan sebagai rumah sakit rujukan di Jawa Timur. "Selama ini banyak rumah sakit besar di Jatim. Tapi, rumah sakit rujukannya belum ada. Makanya, nanti RS UMM ini bisa dijadikan rujukan rumah sakit tersebut," pungkasnya.

Dalam kesempatan ini menteri juga menyinggung soal pelaksanaan otonomi kampus melalui Undang-undang Badan Hukum Pendidikan (BHP), yang dinilai mirip dengan otonomi daerah (Otda). Penilaian tersebut diungkapkan Mendiknas Bambang Sudibyo di kala membuka Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (Pimnas) XXII di Malang, kemarin (22/7).

Menurut dia, secara prinsip, pelaksanaan otonomi kampus yang tertuang dalam UU BHP itu hampir sama dengan UU Otda. Makanya, dia mengimbau agar para rektor khususnya di perguruan tinggi negeri belajar kepada kepala daerah baik itu bupati, wali kota maupun gubernur.

"Untuk taraf implementasi otonomi kampus itu mirip dengan otonomi daerah. Makanya, para rektor bisa belajar pada kepala daerah di masing-masing daerahnya. Itu mengingat, kepala daerah lebih dulu menerapkan Otonomi daerah," tegasnya.

Kendati demikian, dia tidak menyangkal jika tidak semua rektor perlu belajar pada kepala daerah. Sebab, rektor-rector perguruan tinggi swasta sejak awal sudah melaksanakan otonomi kampus secara total. ■ aji